



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120  
Telepon (021) 859100 31, Faksimile (021) 859100 30  
E-mail: [humas@bpkp.go.id](mailto:humas@bpkp.go.id)

---

**SIARAN PERS**

**Pengawasan Intern Tidak Menghambat Penyerapan Anggaran  
Penanganan Covid-19**

Jakarta (10/7) - Deputi Kepala BPKP Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang menegaskan, BPKP tidak mempersulit proses pengawasan dalam penggunaan anggaran percepatan penanganan Covid-19.

Salamat menjabarkan, ketika kebijakan pemerintah diluncurkan sampai dengan sekarang, kami dari sektor pengawasan justru membuka ruang untuk fungsi pendampingan atau *consulting*. Dimana kata Salamat, BPKP mengedepankan bagaimana mendampingi temen-temen di sektor pelaksanaan supaya mereka dalam kehati-hatian tanpa memperlambat pelaksanaan program.

"Jadi praktis dalam melaksanakan pengawasan, BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya selalu mengedepankan peran pendampingan atau *consulting* terlebih dahulu, baru peran penjaminan atau *assurance*. Terkait program pemulihan ekonomi nasional, saat ini kami masih mengoptimalkan fungsi *consulting*, belum ke arah audit" katanya dalam live Talkshow bersama RRI, hari ini.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, fungsi *consulting* yang dilakukan BPKP adalah membantu pelaksana untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga, BPKP tidak melihat apa yang sudah dikerjakan tapi kami mengawal apa yang akan dikerjakan. Sehingga, apabila ada yang meyebut faktor pengawasan yang terlalu ketat menjadi penyebab minimnya penyerapan di Kementerian dan Lembaga, hal itu tidak tepat.

"Kami mendampingi mereka, mengawal apa yang akan mereka kerjakan jadi bukan mengawasi. Kita belum melakukan audit," tambahnya.

Selain itu, dari sektor pengawasan kita semua berpikir bersama, dimana kita tidak menjadi bagian dari masalah tapi menjadi solusi dari masalah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat marah besar dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyoalkan kinerja kabinet yang tidak optimal dalam menangani COVID-19. Jokowi menekankan kalau dirinya bahkan berani mempertaruhkan reputasi politiknya demi rakyat Indonesia, demi negara. "Kita semua yang ada di sini bertanggung jawab terhadap 267 juta rakyat Indonesia", tegasnya.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP,

ttd.

Syaifudin Tagamal